

ARGO INDUSTRI DI INDONESIA

Istilah industri mempunyai dua arti. Pertama, industri dapat berarti himpunan perusahaan-perusahaan sejenis. Kedua, industri dapat pula merujuk ke suatu sektor ekonomi yang didalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi. Kegiatan pengolahan itu sendiri dapat bersifat masinal, elektrikal atau bahkan manual.

Sektor industri diyakini sebagai sektor yang dapat memimpin sektor-sektor lain dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan. Produk-produk industrial selalu memiliki "dasar tukar" (terms of trade) yang tinggi atau lebih menguntungkan serta menciptakan nilai tambah yang cukup besar dibandingkan dengan produk-produk sektor lain. Hal ini disebabkan karena sektor industri memiliki variasi produk yang sangat beragam atau mampu memberikan manfaat marjinal yang tinggi kepada pemakainya. Pelaku bisnis (produsen, penyalur, pedagang, investor) lebih suka berkecimpung dalam bidang industri karena sektor ini memberikan marjin keuntungan yang lebih menarik. Berusaha dalam sektor industri dan berniaga hasil-hasil industri juga lebih diminati karena proses industri serta penanganan produksinya lebih bisa dikendalikan oleh manusia, tidak terlalu bergantung kepada alam semisal musim atau keadaan cuaca.

Karena kelebihan sektor-sektor industri sebagaimana yang dipaparkan tadi, maka industrialisasi dianggap sebagai "obat mujarab" untuk mengatasi masalah pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Kebijakan yang ditempuh seringkali dipaksakan, dalam arti hanya sekedar meniru pola kebijakan pembangunan dinegara maju tanpa memperhatikan keadaan dan kondisi lingkungan yang ada seperti masalah ketersediaan bahan mentah, ketersediaan teknologi, kecakapan tenaga kerja, kecukupan modal, dan sebagainya. Hasil pembangunan paling nyata yang dapat dilihat di negara-negara maju dan kemudian banyak dijadikan cermin pola pembangunan oleh negara-negara berkembang adalah kadar keindustrian perekonomian, yang dianggap merupakan sumber kekayaan, kekuatan, dan keadaan seimbang negara-negara maju atas dasar itu, tidaklah mengherankan jika sebagian negara miskin beranggapan bahwa pengembangan sektor industri merupakan obat yang sangat ampuh untuk memperbaiki keadaan mereka.

Sedikit sekali negara-negara berkembang yang menyadari, bahwa usaha untuk memajukan dan memperluas sektor industri haruslah sejajar dengan pembangunan dan pengembangan sektor-sektor lain, terutama sektor pertanian. Sesungguhnya adalah naif untuk memilih salah satu saja diantaranya. Kedua sektor tersebut justru berkaitan sangat erat. Sektor pertanian yang lebih maju dibutuhkan oleh sektor industri, baik sebagai penyedia masukan maupun sebagai pasar bagi produk-produk industri. Setiap peningkatan daya beli petani akan merupakan langganan bagi pembangunan sektor industri pula. Jadi, kelancaran program industrialisasi sebetulnya tergantung pula pada perbaikan-perbaikan di sektor-sektor lain, dan seberapa

jauh perbaikan-perbaikan yang yang dilakukan mampu mengarahkan dan bertindak sebagai pendorong bagi kemunculan industri-industri baru. Dengan cara demikianlah kebijaksanaan yang ditempuh akan dapat mewujudkan mekanisme saling dukung antar sektor dalam dialektika-sektoral pertanian-industri, itu berarti bahwa harus tercipta suatu keadaan dengan mana surplus tenaga kerja disektor pertanian dapat tertarik ke sektor industri agar sektor pertanian menjadi lebih efisien sehingga dapat menjadi pasar yang lebih efektif bagi sektor industri.

Pada tahun 1920-an industri-industri modern di Indonesia hampir semuanya dimiliki oleh orang asing meskipun jumlahnya relatif sedikit. Industri kecil yang ada pada masa itu hanya berupa industri-industri rumah tangga seperti penggilingan padi, tekstil dan sebagainya, yang tidak terkoordinasi. Tenaga kerja terpusat di sektor pertanian dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan ekspor pemerintah kolonial. Perusahaan besar yang modern hanya ada dua buah, itupun milik asing, yaitu pabrik rokok milik British American Tobacco dan perakitan kendaraan bermotor General Motor Car Assembly. Depresi besar yang melanda sekitar tahun 1930-an telah meruntuhkan perekonomian. Penerimaan ekspor turun dari 1.448 juta gulden (1929) menjadi 505 juta gulden (1935) sehingga mengakibatkan pengangguran. Situasi tersebut memaksa pemerintah kolonial mengubah sistem dan pola kebijaksanaan ekonomi dari menitikberatkan pada sektor perkebunan ke sektor industri, dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam pemberian izin dan fasilitas bagi pendirian industri baru.

Menurut sensus industri kolonial pertama (1939), industri-industri yang ada ketika itu telah menyerjatkan tenaga kerja sebanyak 173 ribu orang yang bergerak dibidang pengolahan makanan dan tekstil serta barang-barang logam, semuanya milik asing. Meskipun sumber dan struktur investasi pada masa itu tidak terkoordinasi dengan baik tetapi, menurut sebuah taksiran, stok investasi total di Indonesia pada tahun 1937 lebih kurang sebesar US\$ 2.264 juta, lebih dari separuhnya (US\$ 1.411 Juta) dimiliki oleh sektor swasta. Dari jumlah tersebut Belanda memegang andil terbesar dengan 63 %. Kemudian Inggris 14%, China 11%, dan Amerika Serikat 7%.

Pada masa perang dunia II kondisi industrialisasi cukup baik. Namun keadaannya berbalik semasa pendudukan Jepang, hal itu disebabkan adanya larangan impor bahan mentah, diangkutnya barang-barang kapital ke Jepang dan pemaksaan tenaga kerja (Romusha) sehingga investasi asing pada masa itu praktis nihil. 15 tahun kemudian setelah merdeka, Indonesia menjadi pengimpor besar barang-barang kapital dan teknologi, serta mulai memprioritaskan pengembangan sektor industri dan menawarkan investasi asing. Berkat kebijaksanaan itu, penanaman modal asing mulai berdatangan meskipun masih dalam taraf coba-coba.

Pada tahun 1951 pemerintah meluncurkan kebijaksanaan RUP (rencana Urgensi perekonomian) program utamanya menumbuhkan dan mendorong industri-industri kecil

bagi pribumi sembari memberlakukan pembatasan-pembatasan untuk industri-indutri besar atau industri modern yang banyak dimiliki oleh orang eropa dan china. Kebijakan RUP ternyata menyebabkan investasi asing berkurang, apalagi dengan adanya situasi politik yang sedang bergejolak pada masa itu, namun dilain pihak telah memacu tumbuh suburnya sektor bisnis oleh kalangan pribumi, kendati masih relatif kecil. Menyadari situasi demikian, pemerintah kemudian beralih ke pola kebijaksanaan yang menitikberatkan pengembangan industri-indutri yang dijalankan atau dimiliki oleh pemerintah.

Perkembangan industri sejak orde baru, atau tepatnya semasa pembangunan jangka panjang tahap pertama, sangat mengesankan. Hal itu dapat dilihat dari berbagai ukuran perbandingan sebagai jumlah unit usaha atau perusahaan ; jumlah tenaga kerja yang diserap; nilai keluaran yang dihasilkan; sumbangan dalam perolehan devisa; kontribusi dalam pembentukan pendapatan nasional, serta tingkat pertumbuhannya.